



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## ORGANISASI KHILAFATUL MUSLIMIN DAN POTENSI ANCAMAN RADIKALISME

**Aulia Fitri**  
Peneliti Ahli Pertama  
*aulia.fitri@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Penangkapan Abdul Qadir Hassan Baraja atas kasus provokasi dan ujaran kebencian terkait penggantian ideologi Pancasila dengan khilafah membuka jalan terungkapnya organisasi Khilafatul Muslimin. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi keagamaan yang memiliki sistem kekhalifahan. Secara legalitas, organisasi ini tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham. Selain bertentangan dengan Pancasila, organisasi ini juga terindikasi berupaya membangun negara dalam negara.

Organisasi Khilafatul Muslimin membangun pemerintahan sendiri menyerupai sebuah negara. Berdasarkan temuan BNPT, organisasi ini telah membangun struktur pemerintahan, sistem kewarganegaraan dan susunan kemasyarakatan, sistem pendidikan, sistem pertukaran barang dan jasa, bahkan sistem nomor induk warga seperti NIK dalam KTP untuk 14.000 anggotanya. Setiap anggota dibaiat dan diberikan buku pedoman organisasi yang mengacu pada ajaran Kartosoewirjo yang merupakan proklamator Negara Islam Indonesia (NII). Khilafatul Muslimin memiliki struktur mirip NII mulai dari amir khilafah hingga tingkatan terendah di desa.

Pemimpin organisasi ini, Abdul Qadir Hassan Baraja tercatat pernah terlibat dalam sejumlah aksi teror di Indonesia, salah satunya pengeboman di Candi Borobudur tahun 1985. Selain itu, struktur kepengurusan organisasi ini diisi oleh para mantan narapidana terorisme yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Dalam sistem pendidikan, terdapat Rois Tarbiyah Wataklim atau Menteri Pendidikan versi Khilafatul Muslimin untuk mengatur kurikulum, menyusun silabus, membuat bahan ajar serta menunjuk guru pengajar dan kepala sekolah. Saat ini, terdapat 30 sekolah terafiliasi organisasi Khilafatul Muslimin. Organisasi ini terafiliasi dengan berbagai lembaga pendidikan mulai setara Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menerapkan larangan hormat pada bendera merah putih serta larangan untuk memasang foto presiden dan wakil presiden.

Radikalisme telah menjadi masalah di Indonesia, bahkan pada perjalanan bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan, seperti peristiwa Madiun/PKI (1948), DI /TII (1949), G 30 S/ 5 PKI (1965) dan konflik-konflik internal lainnya dalam skala lebih kecil. Timbul tenggelamnya gerakan radikal sejak lama sampai saat ini dapat dianggap sebagai fenomena bahwa radikalisme sebagai ancaman potensial. Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi ditandai dengan sikap atau paham yang ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Gerakan-gerakan radikalisme berupaya untuk mengadakan perubahan secara cepat, menyeluruh dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengindahkan ketentuan dan konstitusi yang berlaku, tidak toleran dan cenderung memaksakan keyakinannya.

Organisasi Khilafatul Muslimin masih dikategorikan sebagai organisasi intoleran oleh BNPT. Namun demikian, potensi ancaman radikalisme tetap perlu diwaspadai. Infiltrasi paham radikalisme dapat bereskalasi dan berkembang menjadi tindakan kekerasan, terorisme, bahkan gerakan yang mengancam kedaulatan negara. Kelompok radikal juga cenderung

memanfaatkan kebebasan berpendapat di era demokrasi untuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Cara penyebaran paham khilafah oleh Khilafatul Muslimin dengan pendekatan *soft approach* melalui dakwah dan pengajaran lewat insititusi pendidikan telah menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada dinamika penanaman paham radikal. Ancaman pada dasarnya bersifat dinamis, termasuk ancaman radikalisme, strategi dan cara-cara baru terus diterapkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sebagai konsekuensi, pemerintah juga dituntut untuk menerapkan penanggulangan ancaman radikalisme yang lebih holistik dan memerlukan kerjasama yang solid antar *stakeholder* terkait. Kerjasama antar instansi menjadi penting karena terdapat keterkaitan permasalahan yang ditimbulkan dari penyebaran ancaman radikalisme, terutama di bidang pertahanan, keamanan dan pendidikan. Kerjasama yang solid dibutuhkan agar upaya preemtif dan preventif dalam menanggulangi gerakan radikal di berbagai wilayah dapat diterapkan secara maksimal.

## Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong para mitra kerjanya untuk upaya pencegahan dan penanganan potensi ancaman radikalisme, termasuk berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya.

Komisi I dapat mendorong Kementerian Pertahanan, selaku penyusun kurikulum bela negara untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam penguatan materi bela negara di lembaga pendidikan, mengingat infiltrasi paham radikal mulai masuk melalui pendidikan formal.

Komisi I dapat menghimbau Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk terus memantapkan pembinaan ketahanan nasional bangsa dari potensi ancaman radikalisme. Serta memperkuat kerjasama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional, dan kerjasama pengkajian strategik dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi pemerintah.

Komisi I juga dapat menghimbau Badan Intelijen Negara untuk terus memantau pergerakan organisasi berbasis paham radikal sebagai bentuk upaya mitigasi dan *early warning* terhadap pemerintah agar potensi ancaman radikalisme dapat dicegah dan diatasi sebelum tereskalasi menjadi ancaman yang lebih serius.

## Sumber

cnnindonesia.com, 21 Juni 2022;  
detiknews.com, 22 Juni 2022;  
kompas.com, 20 dan 22 Juni 2022;  
republika.co.id, 22 Juni 2022;  
tempo.co, 19 Juni 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd\\_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S  
Sri Nurhayati Q  
Sulasi Rongiyati  
Edmira Rivani

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022